

EVALUASI PERDA KABUPATEN BOJONEGORO NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA (STUDI EVALUASI KEBIJAKAN BUMDes DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO

Budi Utomo

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
budi.utomo120214@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.,

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras merupakan salah satu dari 21 BUMDes yang masih aktif di Kabupaten Bojonegoro. BUMDes di Desa ini memiliki 4 unit usaha yaitu unit usaha air bersih (Hippam), unit usaha simpan pinjam, unit usaha rumah bayar listrik, dan unit usaha toko pertanian. permasalahan yang terdapat pada BUMDes ini adalah BUMDes ini belum mampu mengoptimalkan pendapatannya dari keempat unit usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 Tentang Desa (Studi Evaluasi Kebijakan BUMDes di Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Pendamping BUMDes di Desa Sugihwaras yang ditunjuk oleh BAPPEDA, Sekdes Desa Sugihwaras yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Desa Sugihwaras, dan sebagian masyarakat Desa Sugihwaras sebagai pengguna layanan BUMDes. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras yang dilihat dari 6 indikator model evaluasi yang telah dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu 1) efektivitas, BUMDes di Desa Sugihwaras belum mampu mencapai tujuan dari didirikannya BUMDes karena BUMDes belum mampu meningkatkan PADes yang didasari dari BUMDes ini terlalu fokus untuk membantu masyarakat tanpa memikirkan keuntungan, Untuk mengelola potensi desa hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang dapat mencapainya sedangkan ketiga unit usaha yang lain belum mampu, dari segi menciptakan lapangan kerja BUMDes ini belum mampu menciptakan lapangan kerja karena ketidakmampuan pemerintah desa dalam menggaji pengurus BUMDes 2) efisiensi, yang terjadi dilapangan adalah biaya perawatan sarana dan prasana serta biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat sehingga hampir tidak ada keuntungan, disamping itu gaji yang diterima pengurus BUMDes tidak sepadan dengan usaha yang telah dilakukan, 3) kecukupan, BUMDes di Desa Sugihwaras ini belum mampu memberikan kontribusi pada peningkatan PADes, unit usaha yang mampu mengoptimalkan potensi desa hanya unit usaha air bersih (Hippam) dari keempat unit usaha yang ada, dan juga BUMDes belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Desa Sugihwaras dikarenakan gaji yang diberikan minim, 4) perataan, hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang mampu menjangkau semua masyarakat Desa Sugihwaras, sedangkan ketiga unit usaha lainnya belum mampu melakukan hal tersebut, 5) responsivitas, dari keempat unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes di Desa Sugihwaras hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang mendapat respon yang baik dari masyarakat Desa Sugihwaras, 6) ketepatan, BUMDes ini belum tepat karena belum mampu meningkatkan PADes yang didasari dari kurangnya dukungan pemerintah desa untuk menaikkan tarif, unit usaha ini juga belum tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena unit usahanya bergerak dibidang jasa yang tidak melibatkan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras masih belum optimal, maka saran peneliti adalah 1) Perlu adanya kenaikan tarif pada pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan masyarakat desa dan biaya operasional, 2) penghapusan unit usaha rumah bayar listrik karena sudah tidak efektif dan digantikan dengan unit usaha baru yang dapat merangkul masyarakat sehingga selain meningkatkan PADes juga meningkatkan pendapatan masyarakat, 3) Pekerjaan sebagai pengurus BUMDes diharapkan dapat menjadi pekerjaan utama, sehingga pengurus BUMDes fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes.

Kata kunci : Evaluasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Abstract

Business entity belonging to the village (BUMDes) in the village of Sugihwaras is one of 21 BUMDes active in Bojonegoro. BUMDes in the village of Sugihwaras has four business units i.e. clean water business unit (Hippam), the business unit save the home business unit, borrow to pay electricity, farm shops and business units. Problems found in this BUMDes is BUMDes is not yet able to optimize its revenue from

the four business units. The purpose of this study was to describe the evaluation applicable local district of Bojonegoro No. 9 In 2010 about village (study evaluation of the policy of BUMDes in the village of Sugihwaras subdistrict of Kepohabru district of Bojonegoro). This type of research is descriptive qualitative approach. The subject of this research consists of the Escort BUMDes in the village of Sugihwaras appointed by BAPPEDA Sugihwaras Village Sekdes, which is the representative of the Government of the village of Sugihwaras, and most villagers Sugihwaras as user BUMDes service. Engineering data collection consists of observation, interview and documentation. The analysis of the data used in the form of data collection, reduction, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. The results showed evaluation of the village-owned enterprise (BUMDes) in the village of Sugihwaras seen from the 6 indicators evaluation models that have been put forth by William n. Dunn is 1) effectiveness, BUMDes in the village of Sugihwaras hasn't been able to achieve the goal of establishment of BUMDes because BUMDes hasn't been able to increase the PADes based from this BUMDes too focused to help the community with no thought of profit, to manage the potential of the village only clean water business unit (Hippam) which can achieve this while the third unit other businesses haven't been able to , in terms of creating jobs this BUMDes have not been able to create jobs because of the inability of the Government of the village in hire BUMDes sysop 2) efficiency, which is the real cost of care means and infrastructure repair and operational costs are not proportional to the income obtained so that almost no advantages, besides Executive Board BUMDes salary is not commensurate with the effort that has been done, 3) sufficiency BUMDes in the village of Sugihwaras, it hasn't been able to contribute to the improvement of PADes, the business unit which is able to optimize the potential of the village only clean water business unit (Hippam) of the four business units that exist, and also BUMDes are not yet able to provide decent employment for the people of the village of Sugihwaras due salaries given minimal, 4) alignment, only clean water business unit (Hippam) which is able to reach all of Sugihwaras village community the third business unit, while others haven't been able to do so, 5) responsiveness, from the four business units owned by the BUMDes in the village of Sugihwaras only clean water business unit (Hippam) which received good response from the community of the village of Sugihwaras, 6) precision, BUMDes this is not right because it hasn't been able to increase the PADes based of the lack of Government support of the village to raise tariffs, business unit is also not yet appropriate to increase people's income because of its business units engaged in services that do not involve the community. So it can be concluded that evaluation of the business entity belonging to the village (BUMDes) in the village of Sugihwaras is still not optimal, then the advice of researchers is 1) tariff increase in the need for services provided by considering the village community and operational cost, 2) removal of the home business unit pay electricity because it was ineffective and was replaced with a new business unit that can embrace the community so that apart from increasing people's income also improved the PADes , 3) a job as caretaker of the BUMDes expected to become the main work, so the sysop BUMDes focus in managing and developing BUMDes.

Keywords: Evaluation, Corporately-owned village (BUMDes)

PENDAHULUAN

Pembangunan sejatinya memiliki tujuan untuk membangun kemandirian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang terdepan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Pada kenyataannya menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:1), meskipun pengembangan ekonomi pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah, tetap saja upaya tersebut belum berhasil. Salah satu penyebab belum tercapainya tujuan tersebut adalah intervensi dari pemerintah yang masih terlalu besar terhadap pengembangan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan asumsi tersebut maka pemerintah seharusnya mendorong kemandirian desa untuk mengelola potensi daerahnya sendiri. Untuk itu maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di beberapa kabupaten di Indonesia telah banyak desa yang mendirikan BUMDes. Salah satu kabupaten yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Bojonegoro yang diamanatkan melalui Perda No. 9 Tahun 2010 Tentang Desa pasal 247. Salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki BUMDes adalah Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru. BUMDes ini telah didirikan pada tahun 2007 dengan memiliki 4 unit usaha yaitu:

1. Unit Usaha Air Bersih (Hippam)
2. Unit Usaha Simpan Pinjam
3. Unit Usaha Rumah Bayar Listrik
4. Unit Usaha Toko Pertanian

Dari keempat unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes telah banyak berkontribusi kepada desa dan masyarakat. Akan tetapi terdapat permasalahan pada BUMDes tersebut diantaranya, pada unit usaha Hippam biaya operasional dan biaya perawatan sarana dan prasarana yang mahal tidak seimbang dengan tarif pembayaran murah. Selain itu pada unit usaha simpan pinjam terkendala kredit macet. Dari unit

usaha rumah bayar listrik juga belum dapat mengoptimalkan pendapatannya karena memiliki keuntungan yang sedikit. Adapun pada unit usaha toko pertanian juga belum dapat diandalkan karena jumlah penjualan produk yang tidak menentu setiap harinya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Pendamping BUMDes di Desa Sugihwaras yang ditunjuk oleh BAPPEDA, Sekdes Desa Sugihwaras yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Desa Sugihwaras, dan sebagian masyarakat Desa Sugihwaras sebagai pengguna layanan BUMDes. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sugihwaras belum mampu mencapai hasil atau tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini belum mampu mengoptimalkan keuntungannya. Hal ini karena dari pihak BUMDes dan pemerintah Desa Sugihwaras berprinsip bahwa BUMDes ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari prinsip tersebut baik dari BUMDes maupun pemerintah Desa Sugihwaras terlalu fokus untuk membantu masyarakat tanpa memikirkan keuntungan yang didapat. Hal ini menjadikan keuntungan dari BUMDes ini sendiri sangat minim.

Dari keuntungan BUMDes yang sangat minim ini, BUMDes belum mampu berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan untuk mencari keuntungan guna menjadi salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Akan tetapi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini malah sebaliknya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk membantu masyarakat Desa Sugihwaras. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini belum mampu mencapai tujuannya.

Disamping itu dari keempat unit usaha yang ada, hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang benar-benar mampu mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan desa. Sedangkan untuk ketiga unit usaha yang lainnya belum mampu memaksimalkan pengelolaan potensi desa. Unit usaha toko pertanian memiliki kendala sumber daya manusia yang kurang mumpuni sehingga kurang efektif dalam pengelolaannya. Dari unit usaha simpan pinjam,

minimnya modal dan keterbatasan layanan menjadikan pelayanan unit usaha ini kurang efektif. Dari unit usaha rumah bayar listrik hadirnya pembayaran listrik secara prabayar menjadikan unit usaha ini tidak lagi berjalan efektif karena masyarakat mulai beralih pada sistem pembayaran prabayar.

BUMDes di Desa Sugihwaras ini juga belum efektif dalam menciptakan lapangan kerja karena ketidakmampuan pihak Pemerintah Desa Sugihwaras dalam memberikan gaji kepada pengurus BUMDes. Hal ini menjadikan pekerjaan sebagai pengurus BUMDes hanyalah sebagai pekerjaan sampingan.

2. Efisiensi

Dalam pengukuran tingkat efisiensi ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini menitikberatkan pada perbandingan modal awal dan keuntungan yang didapat. Selain itu juga pada pengukuran tingkat efisiensi ini juga berfokus pada hasil yang didapat oleh pengurus BUMDes dengan usaha yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang telah didapat, dapat diketahui bahwa modal yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Dari modal awal sebesar Rp 318.000.000,- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 16.800.000,- pada tahun 2015. Dengan begitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini butuh waktu lama untuk mengembalikan modalnya dan menikmati hasil keuntungannya. Dengan kata lain BUMDes ini masih merugi sampai sekarang. Dengan keuntungan yang hanya sebesar itu pun hanya didapat dari satu unit usaha yaitu unit usaha air bersih (Hippam). Dengan kata lain BUMDes ini masih merugi. Hal ini disebabkan oleh tarif yang murah yang dipatok pada semua unit usahanya.

Dalam urusan menyejahterakan pengurusnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini belum mampu menggaji pengurusnya secara layak. Gaji pengurus BUMDes ini hanya berkisar Rp100.000,- sampai Rp 350.000,- dan itupun hanya dari unit usaha air bersih (Hippam). Sedangkan dari unit usaha lainnya pengurus BUMDes ini hanya mendapat gaji dibawah Rp 100.000,-. Dengan gaji yang sangat minim tersebut sudah pasti tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Kecukupan

Dalam pencapaiannya selama ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini belum mampu memberikan peningkatan pemasukan kepada desa. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapatkan oleh BUMDes ini bisa dikatakan hanya mampir pada kas desa. Pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes ini memang

masuk ke kas desa sebagai PADes. Akan tetapi dari pihak pemerintah desa dikembalikan kepada BUMDes lagi. Disamping itu juga dalam mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Sugihwaras BUMDes ini hanya mengandalkan unit usaha air bersih (Hippam). Karena memang hanya unit usaha ini yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sugihwaras. Kesulitan yang dialami masyarakat Desa Sugihwaras dalam mencari air bersih dapat diatasi oleh unit usaha ini. Sedangkan dari unit usaha lainnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sugihwaras. Keterbatasan modal menjadikan masalah bagi unit usaha simpan pinjam untuk memberikan pinjaman untuk sebagian masyarakat Desa Sugihwaras. Sedangkan hadirnya listrik Prabayar dan sistem pembayaran listrik secara online menjadikan unit usaha ini mulai ditinggalkan masyarakat. Dari unit usaha toko pertanian juga demikian, meskipun memiliki obat-obatan yang cukup lengkap, akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia dalam melayani pembeli menjadi kendala.

Dari segi lapangan kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini belum cukup untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Minimnya gaji yang diperoleh menjadikan pekerjaan sebagai pengurus BUMDes ini tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kendati ingin memberikan gaji yang layak, pihak pemerintah desa maupun BUMDes ini masih terkendala masalah kurangnya dana untuk menggaji mereka.

4. Perataan

Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras hanya dapat mengandalkan unit usaha air bersih (Hippam). Unit usaha air bersih (Hippam) ini menjadi satu-satunya unit usaha yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat Desa Sugihwaras. Bahkan unit usaha air bersih (Hippam) ini telah didirikan jauh sebelum adanya BUMDes. Hal ini menjadikan unit usaha ini menjadi unit usaha yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sugihwaras.

Sedangkan untuk ketiga unit usaha yang lainnya belum mampu memberikan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat Desa Sugihwaras. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, keterbatasan modal yang dimiliki oleh unit usaha simpan pinjam ini menjadikan unit usaha ini juga mengalami keterbatasan dalam meminjamkan uang kepada masyarakat Desa Sugihwaras. Hal ini menjadikan unit usaha ini hanya dapat dirasakan oleh segelintir masyarakat Desa Sugihwaras.

Hal ini juga terjadi pada unit usaha rumah bayar listrik. Dengan adanya pembayar listrik secara Prabayar dan dapat dilakukan dengan sistem online menjadikan unit usaha ini mulai ditinggalkan masyarakat Desa Sugihwaras. Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha ini

tidak lagi dapat menjangkau semua masyarakat Desa Sugihwaras.

Dari toko pertanian pun mengalami hal sama. Kendati rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Sugihwaras sebagai seorang petani. Akan tetapi karena penjaga toko dari unit usaha ini adalah orang awam yang menjadikan kurang memiliki kecakapan dalam melayani petani.

5. Responsivitas

Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras belum bisa dikatakan secara utuh dapat memuaskan masyarakat. Hal ini terjadi karena dari keempat unit usaha yang ada, hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang mampu memuaskan masyarakat. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang disambut dengan tanggapan positif oleh masyarakat Desa Sugihwaras. Karena memang hanya unit usaha ini yang sangat vital bagi masyarakat Desa Sugihwaras.

Sedangkan untuk ketiga unit usaha yang lainnya belum mampu memuaskan masyarakat Desa Sugihwaras. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa ketiga unit usaha lainnya ini bukan merupakan unit usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Desa Sugihwaras. Hal ini menjadikan respon yang kurang baik dari ketiga unit usaha yang lain.

6. Ketepatan

Berdasarkan yang ditemui di lapangan pendirian BUMDes di Desa Sugihwaras ini belum tepat dalam hal meningkatkan PADes. Kurangnya dukungan pemerintah desa untuk menaikkan tarif pelayanan unit usaha BUMDes menjadikan BUMDes tidak dapat memaksimalkan pendapatannya guna menyumbang PADes. Selain itu BUMDes di Desa Sugihwaras ini juga belum mampu memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat Desa Sugihwaras. Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes bergerak dalam bidang jasa menjadikan unit usaha ini belum tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sugihwaras.

Selain itu dengan unit usaha yang bergerak dalam bidang jasa membuat unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Tidak dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Sugihwaras.

PENUTUP

Simpulan

Dilihat dari indikator efektivitas, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini belum mampu mencapai hasil yang telah diamanatkan oleh Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 tentang Desa pasal 247. BUMDes ini belum mampu meningkatkan PADes karena terlalu fokus untuk

membantu masyarakat tanpa memikirkan keuntungan yang didapat. Hal ini menjadikan keuntungan dari BUMDes ini sendiri sangat minim. Sehingga belum mampu berkontribusi pada peningkatan PADes. Selain itu hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang benar-benar mampu mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan desa. Sedangkan untuk ketiga unit usaha yang lainnya belum mampu memaksimalkan pengelolaan potensi desa. BUMDes di Desa Sugihwaras ini juga belum efektif dalam menciptakan lapangan kerja karena ketidakmampuan pihak Pemerintah Desa Sugihwaras dalam memberikan gaji kepada pengurus BUMDes. Hal ini menjadikan pekerjaan sebagai pengurus BUMDes hanyalah sebagai pekerjaan sampingan.

Dari Indikator efisiensi, pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Disamping itu juga tarif yang dipatok oleh BUMDes ini tidak seimbang dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Tarif yang murah tidak sebanding dengan biaya operasional maupun perawatan sarana dan prasarana yang cukup mahal. Disamping itu, gaji yang diberikan kepada pengurus BUMDes ini juga tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan

Dari indikator kecukupan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini belum mampu sepenuhnya mencukupi. Dari segi peningkatan PADes, BUMDes ini belum mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dari segi pemanfaatan potensi desa. BUMDes ini telah berhasil dalam mengelola potensi yang ada. Akan tetapi hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang dapat melakukan. Dari segi penyerapan tenaga kerja, BUMDes ini belum mampu memaksimalkannya karena terkendala ketidakmampuan dalam menggaji.

Dari indikator perataan, dari keempat unit usaha yang ada. Hanya unit usaha air bersih (Hippam) yang dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat Desa Sugihwaras. Sedangkan ketiga unit usaha lainnya belum mampu melakukannya. Hanya sebagian warga saja yang mampu dijangkau oleh ketiga unit usaha lainnya.

Dari indikator responsivitas, hanya unit usaha air bersih (Hippam) ini yang mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Sedangkan ketiga unit usaha lainnya belum mampu mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.

Dari indikator ketepatan, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras ini belum tepat untuk meningkatkan PADes, selain itu pendirian BUMDes ini belum tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Unit usaha yang bergerak dalam bidang jasa belum tepat untuk menciptakan lapangan kerja

Saran

Adapun saran yang berdasarkan hasil penelitian ini untuk dijadikan referensi untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Tarif yang murah menjadi masalah bagi BUMDes ini untuk mencari keuntungan. Untuk itu perlu adanya kenaikan tarif pada pelayanan yang telah diberikan. Kenaikan tarif ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat Desa Sugihwaras dan biaya operasional yang dikeluarkan
2. Untuk meningkatkan pendapatan BUMDes ini, diperlukan penghapusan unit usaha rumah bayar listrik karena sudah tidak efektif lagi. Unit usaha ini diharapkan diganti dengan unit usaha lain yang dapat merangkul masyarakat sehingga selain meningkatkan PADes juga meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Pekerjaan sebagai pengurus BUMDes diharapkan menjadi pekerjaan utama. Sehingga pengurus BUMDes dapat fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes.

Ucapan Terima Kaih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Indah Prabawati S.Sos., M.AP. Sebagai dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih juga untuk Ibu Hj. Weni Rodiana, S.Sos., M.AP. dan Bapak M. Farid Ma'Aruf, S.Sos., M.AP. sebagai dosen penguji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung:Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brajajaya
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta Bumi Aksara
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. 2014. Jakarta:Bee Media Pustaka
- Soetomo. 2007. *Teori-Teori Sosial Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan RnD*. Bandung: Alfabeta
- Tauran dan Indah Prabawati. 2015. *Evaluasi Kebijakan*. Surabaya:Unesa University Press

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:UMM Press

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Website

<http://bumdesa.or.id/2016/09/13/bumdesa-aneka-usaha-terbaik-ke-3-dalam-evaluasi-bumdesa-se-jatim/>. *BUMDesa Aneka Usaha Bojonegoro Terbaik Ke-3 dalam Evaluasi BUMDesa Se-Jatim*. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016

Perundang-Undangan

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2010 Tentang Desa

